

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Renja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra Perangkat Daerah Dan RPJM.

Rencana Kinerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang termasuk dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yaitu :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- c. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
- d. Penetapan Renja Perangkat Daerah

Rancangan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, mengacu pada Renstra Perangkat Daerah, mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Perangkat Daerah, sesuai

dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Renja seluruh Perangkat Daerah Se-Kabupaten Kapuas Hulu akan menjadi bagian dari RKPD Kabupaten Kapuas Hulu. RKPD menjadi acuan dalam pembuatan RAPBD, sehingga Renja Perangkat Daerah adalah komponen penting yang harus dibuat. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;

- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Kabupaten Kapuas Hulu 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan

menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah serta sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2020.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kinerja ini adalah :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan yang berdasarkan APBD;
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf Inspektorat dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Inspektorat;
5. Agar Inspektorat mampu berperan sebagai fasilitator (mitra) bagi unit-unit kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menurut prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Lalu (2019) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pada Tahun 2019 Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu memuat 7 (Tujuh) Program dengan 31 (Tiga Puluh Satu) Kegiatan dengan jumlah dana sebesar Rp.6.080.868.860,00, terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - e. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - l. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - m. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - n. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
 - o. Penyusunan RKA dan DPA
 - p. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor
 - q. Penyediaan Jasa Publikasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Oprasional
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - d. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD
 - e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD
 - f. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kabupaten Kapuas Hulu
- 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 6. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
 - b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
 - c. Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
 - d. Penunjang Operasional Unit Pemberantasan Pungli

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Perbandingan Renja 2019 dan APBD 2019

No.	Keterangan	Renja 2019	APBD 2019
1.	Jumlah Program	7	7
2.	Jumlah Kegiatan	31	31
3.	Pagu Anggaran	Rp. 8.528.090.868	Rp. 1.846.848.026.324,00

Jumlah anggaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 yaitu Belanja Langsung sebesar Rp. 6.080.868.868,00 realisasi keuangannya sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 adalah Rp.3.709.574.000,00 atau sebesar 61 % dan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.447.222.000,00 realisasi keuangannya sampai dengan Agustus Tahun 2019 adalah Rp. 2.274.128.617,00 atau sebesar 92,03 %. Dengan demikian jumlah keseluruhannya adalah Rp. 8.528.090.868,00 dengan realisasi keuangannya sampai dengan Triwulan II tahun 2019 adalah Rp. 5.983.703.098,00 atau sebesar 46,36%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Didalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 56 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Inspektur, yang membawahi :
 - Subbagian Perencanaan
 - Subbagian Analis dan Evaluasi
 - Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2019

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pengawasan Internal yang berkualitas	1	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal “BB”	75%	5	13,15%
		2	Persentase Temuan yang selesai ditindak lanjuti	91%	39,53%	43,92 %
		3	Level Maturitas SPIP Kabupaten	3	2,79	93%
		4	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	92%	99%	99%
		5	Persentase Kerugian Keuangan Negara yang selesai ditindaklanjuti			
2	Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat	1	Level Kapabilitas APIP	3	2,695	89%
		2	Predikat SAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	BB	BB	100%

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2020 jumlah Pemeriksaan direncanakan sebanyak kurang lebih 125 Obrik, sedangkan realisasinya belum direkap semua karena masih dalam proses pelaksanaan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabuapten Kapuas Hulu telah merencanakan program kegiatan untuk Tahun 2018, namun terdapat permasalahan atau hambatan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan adalah :
 - Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan
 - Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengawasan
 - Luas dan Jauhnya Jangkauan Lokasi Pemeriksaan.
 - Kurang siapnya auditan yang diperiksa.
 - Terbatasnya peralatan pemeriksaan dilapangan seperti kamera digital, alat ukur, hammer test (test kekuatan beton).
 - Terbatasnya dana untuk pelaksanaan pemeriksaan.
2. Hambatan dalam melakukan Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah terbatasnya waktu pemeriksaan, terbatasnya Sumber Daya Manusia dan kurangnya koordinasi serta luas dan jauhnya jangkauan lokasi / tempat pemeriksaan maupun terbatasnya dana untuk kegiatan dimaksud dan data yang kurang lengkap, selain itu kurangnya kepedulian obrik untuk penyelesaian Tindak Lanjut temuan Hasil Pemeriksaan.
3. Hambatan dalam melakukan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah :
 - a. Terbatasnya dana dan prasarana transportasi.
 - b. Terbatasnya waktu yang disediakan,
 - c. Kurangnya koordinasi dan data yang kurang lengkap (akurat).
4. Hambatan yang dihadapi dalam membuat laporan periodik adalah :
 - a. Terlambatnya Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya.
 - b. Data yang kurang lengkap dan akurat.
 - c. Data-data kelengkapan pemeriksaan yang tidak segera disampaikan setelah pemeriksaan.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD Terhadap Renja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan / tidak ada.

EVALUASI HASIL RENJA OPD
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I TAHUN 2017								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Keterangan				
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.			K	Rp. (000)	K	Rp.
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)														
1	2				3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/5*100		17	18				
1	01	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100,00	persen	8.953.978		1.352.677		1.785.656									3.916.440				5.702.096								
	01	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pos keperluan surat menyurat dan jumlah paket/pengiriman	100	%	61.750	100	6.093	100	7.210	13,38	965	8,32	600	36	2.617	100	7.188	158	11.370	157,70	157,70	257,70	18.580	257,70	30,09					
	01	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	%	179.000	100	76.602	100	35.800	5,42	1.939	30,66	10.975	23	8.098	86	30.922	145	51.934	145,07	145,07	245,07	87.734	245,07	49,01					
	01	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah peserta pengelola administrasi keuangan SKPD	100	%	1.284.400	100	259.405	100	256.880	-	-	6,56	16.845	63	161.390	99	254.580	168	432.815	168,49	168,49	268,49	689.695	268,49	53,70					
	01	01	01	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	100	%	46.465	100	6.000	100	9.293	33,16	3.082	41,41	3.849	52	4.793	100	9.293	226	21.017	226,15	226,15	326,15	30.310	326,15	65,23					
	01	01	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	%	165.000	100	11.570	100	33.000	22,67	7.481	44	14.449	48	15.824	100	32.997	214	70.750	214,39	214,39	314,39	103.750	314,39	62,88					
	01	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	%	677.540	100	77.930	100	135.508	15,00	20.321	49	66.025	50	67.725	100	135.508	214	289.579	213,70	213,70	313,70	425.087	313,70	62,74					
	01	01	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	%	605.800	100	42.798	100	121.160	11,96	14.488	47	56.661	68	81.893	100	121.159	226	274.203	226,31	226,31	326,31	395.363	326,31	65,26					
	01	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	%	130.000	100	4.961	100	26.000	11,38	2.959	11	2.959	11	2.959	100	25.999	134	34.875	134,13	134,13	234,13	60.875	234,13	46,83	INSPEKTORAT				
	01	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	425.500	100	30.950	100	85.100	1,21	1.030	60	50.848	60	51.008	99	84.347	220	187.232	220,01	220,01	320,01	272.332	320,01	64,00					
	01	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	%	14.380	100	8.200	100	2.876	44,51	1.280	97	2.798	97	2.798	97	2.798	336	9.673	336,32	336,32	436,32	12.549	436,32	87,26					
	01	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	100	%	412.623	100	61.430	100	82.525	16,53	13.642	63	51.834	68	55.814	100	82.514	247	203.804	246,96	246,96	346,96	286.328	346,96	69,39					
	01	01	01	018	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	%	4.267.520	100	620.289	100	853.504	12,40	105.801	46	393.561	73	619.035	100	853.427	231	1.971.825	231,03	231,03	331,03	2.825.329	331,03	66,21					
	01	01	01	019	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	%	160.875	100	37.435	100	32.175	25,85	8.316	35	11.396	78	24.953	100	32.153	239	76.817	238,75	238,75	338,75	108.992	338,75	67,75					
	01	01	01	031	Penyusunan RKA dan DPA	waktu kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	100	%	22.125	100	5.215	100	4.425	-	-	-	-	100	4.425	100	4.425	200	8.850	199,99	199,99	299,99	13.275	299,99	60,00					
	01	01	01	036	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kantor	100	%	501.000	100	103.800	100	100.200	22,90	22.950	80	79.700	69	68.850	100	100.200	271	271.700	271,16	271,16	371,16	371.900	371,16	74,23					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					190,01		190,01				278,24		54,39					
Predikat kinerja																					ST		ST											
2	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	persen	2.575.795		139.040		490.157								1.057.506				1.572.665									
	01	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	waktu Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	%	125.000	100	67.770	100	25.000	-	-	84	20.920	84	20.920	84	20.920	251	62.760	251,04	251,04	351,04	87.760	351,04	70,21					
	01	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor	jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kanto	100	%	1.900.000	100	15.000	100	380.000	-	-	50	189.970	50	189.970	100	379.870	200	759.810	199,95	199,95	299,95	1.139.810	299,95	59,99					
	01	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprerasional	jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprerasional	100	%	550.795	100	56.270	100	110.159	16,83	18.545	48	53.118	48	53.118	100	110.155	213	234.936	213,27	213,27	313,27	345.095	313,27	62,65					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					221,42		221,42				321,42		64,28					
Predikat kinerja																					ST		ST											
3	01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	persen			213.025										386.103				599.128									
	01	01	05	001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi ASN	100	%	1.065.125	100	360.270	100	213.025	0,35	750	17	35.818	66	140.270	98	209.265	181	386.103	181,25	181,25	281,25	599.128	281,25	56,25	INSPEKTORAT				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					181,25		181,25				281,25		56,25					
Predikat kinerja																					ST		ST											
4	01	01	06		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	persen			10.415										71.042				81.457									
	01	01	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	100	%	27.038	100	8.353	100	5.408	100,00	5.408	100,00	5.408	100	5.408	100	5.408	400	21.630	400,00	400,00	500,00	27.038	500,00	100,00	INSPEKTORAT				

EVALUASI HASIL RENJA OPD INSPEKTORAT DAERAH KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2017

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2017		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I TAHUN 2017								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Keterangan	
													I		II		III		IV												
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)			K
1	2				3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/5*100		17	18	
	01	01	06	016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	waktu Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	100	%	25.038	100	8.353	100	5.008	686,76	34.390	100,00	5.008	100	5.008	100	5.008	987	49.412	986,76	986,76	1.086,76	54.420	1.086,76	217,35	T	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					693,38	693,38			793,38	158,68					
Predikat kinerja																					ST	ST									
5	01	01	15		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan layanan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100,00	persen			234.500											485.611				720.111					
	01	01	15	001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	jumlah Pelatihan Pengembangan bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pemerintah	100	%	1.172.500	100	-	100	234.500	-	-	34,58	81.079	73	171.744	99	232.789	207	485.611	207,08	207,08	307,08	720.111	307,08	61,42	INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					207,08	207,08			307,08	61,42					
Predikat kinerja																					ST	ST									
6	01	01	16		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan layanan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100,00	persen			5.408											16.223				21.630					
	01	01	16	002	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	waktu Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100	%	27.038	100	-	100	5.408	-	-	100,00	5.408	100	5.408	100	5.408	300	16.223	300,00	300,00	400,00	21.630	400,00	80,00	INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					300,00	300,00			400,00	80,00					
Predikat kinerja																					ST	ST									
7	01	01	17		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan layanan Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	100,00	persen			-											74.679				150.044					
	01	01	17	001	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	waktu Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	100	%	376.823	100	-	100	75.365	-	-	-	-	-	-	99	74.679	99	74.679	99,09	99,09	199,09	150.044	199,09	39,82	INSPEKTORAT	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					99,09	99,09			199,09	39,82					
Predikat kinerja																					ST	ST									

EVALUASI HASIL RENJA OPD INSPEKTORAT DAERAH KAB. KAPUAS HULU TAHUN 2017

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2016)			Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2017				Realisasi Kinerja Pada Triwulan I TAHUN 2017								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	Keterangan				
																	I		II		III		IV															
																	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)											K	Rp. (000)	K	Rp.
1	2				3	4	5			6			8				9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/5*100		17	18				
8	01	01	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan layanan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	persen			4.019.616											9.700.101				13.719.721												
	01	01	20	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	waktu Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	100	%	16.492.025	100	3.451.932	100	3.298.405	19,52	643.925	51,08	1.684.723	67	2.223.358	100	3.298.392	238	7.850.397	238,01	238,01	338,01	11.148.802	338,01	67,60	INSPEKTORAT								
	01	01	20	003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	waktu Pelaksanaan Kegiatan LHKASN dan Whisleblower system	100	%	865.230	100	108.977	100	173.046	78,97	136.651	11,32	19.586	65	112.387	99	171.835	255	440.459	254,53	254,53	354,53	613.505	354,53	70,91									
	01	01	20	008	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	waktu Pelaksanaan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah	100	%	1.500.000	100	-	100	300.000	-	200.000	66,49	199.471	66	199.471	100	299.172	233	898.113	232,70	299,37	332,70	1.198.113	332,70	79,87									
	01	01	20	009	Majelis TP TGR	waktu Pelaksanaan Kegiatan TP TGR	100	%	651.845	100	-	100	130.369	100,00	130.369	-	-	-	-	100	129.872	200	260.241	199,62	199,62	299,62	390.610	299,62	59,92									
	01	01	20	027	Penyampaian Berkas LP2P	waktu Pelaksanaan Penyampaian Berkas LP2P	100	%	589.000	100	132.326	100	117.800	-	86.567	-	-	41	47.850	99	116.475	139	250.892	139,49	212,98	239,49	368.692	239,49	62,60									
	01	01	20	37	Monitoring dan Evaluasi LHKASN	waktu Pelaksanaan Kegiatan Whisleblower system	100	%	865.230	100	41.550	100	173.046	78,97	136.651	11,32	19.586	65	112.387	99	171.835	255	440.459	254,53	254,53	354,53	613.505	354,53	70,91									
	01	01	20	38	Monitoring dan Evaluasi LHKASN	waktu Pelaksanaan Kegiatan LHKASN	100	%	865.230	100	132.550	100	173.046	78,97	136.651	11,32	19.586	65	112.387	99	171.835	255	440.459	254,53	254,53	354,53	613.505	354,53	70,91									
Rata-rata capaian kinerja (%)																						212,87	240,90			312,87	68,18											
Predikat kinerja																						ST	ST															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						#REF!						15.707.705										0
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																						263,14	266,64			361,67	72,88											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																							ST															
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																						
Faktor penghambat :																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya*) :																																						

EVALUASI HASIL RENJA OPD
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

OPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I TAHUN 2018								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab																					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)																	
1	2				3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/5*100		17																					
1	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100,00	persen	9.108.978		5.179.248		2.094.350								3.620.744				5.715.093																									
	01	01	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa pos keperluan surat menyurat dan jumlah paket/pengiriman	100	%	61.750	100	25.631	100	12.350	4,82	595	9,77	1.207	16	2.009	100	12.350	131	16.161	130,86	130,86	230,86	28.511	230,86	46,17																					
	01	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	%	179.000	100	145.029	100	39.500	17,05	6.735	14,99	5.921	55	21.821	95	37.504	182	71.981	182,23	182,23	282,23	111.481	282,23	62,28																					
	01	01	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	100	%	20.000	100	3.158	100	3.200	-	-	47,94	1.534	48	1.534	99	3.158	195	6.226	194,57	194,57	294,57	9.426	294,57	47,13																					
	01	01	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah peserta pengelola administrasi keuangan SKPD	100	%	1.284.400	100	778.265	100	281.980	-	-	5,60	15.795	28	80.340	94	264.280	128	360.415	127,82	127,82	227,82	642.395	227,82	50,02																					
	01	01	01	008	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	100	%	46.465	100	24.401	100	9.112	19,19	1.749	3,84	350	33	3.028	100	9.108	156	14.235	156,22	156,22	256,22	23.347	256,22	50,25																					
	01	01	01	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	100	%	165.000	100	77.549	100	33.000	7,22	2.383	2,35	775	13	4.218	100	32.981	122	40.357	122,29	122,29	222,29	73.357	222,29	44,46																					
	01	01	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	%	677.540	100	344.065	100	130.630	21,82	28.504	7,38	9.637	62	81.127	100	130.627	191	249.894	191,30	191,30	291,30	380.524	291,30	56,16																					
	01	01	01	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	%	605.800	100	289.476	100	125.540	4,45	5.590	2,79	3.503	12	15.474	100	125.518	120	150.085	119,55	119,55	219,55	275.625	219,55	45,50																					
	01	01	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	%	130.000	100	60.926	100	30.033	-	-	2,52	758	8	2.324	100	29.967	110	33.049	110,04	110,04	210,04	63.082	210,04	48,52																					
	01	01	01	013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	%	425.500	100	243.340	100	128.642	-	-	-	-	79	101.525	100	128.044	178	229.568	178,46	178,46	278,46	358.210	278,46	84,19																					
	01	01	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	%	14.380	100	22.908	100	12.240	9,64	1.180	9,64	1.180	26	3.160	97	11.910	142	17.430	142,40	142,40	242,40	29.670	242,40	206,33																					
	01	01	01	017	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	100	%	412.623	100	226.252	100	82.325	5,99	4.935	12,06	9.929	25	20.289	100	82.308	143	117.460	142,68	142,68	242,68	199.785	242,68	48,42																					
	01	01	01	018	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100	%	4.267.520	100	2.501.394	100	1.034.973	13,31	137.777	25,72	266.161	57	591.483	99	1.027.676	195	2.023.098	195,47	195,47	295,47	3.058.071	295,47	71,66																					
	01	01	01	019	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100	%	160.875	100	102.458	100	50.000	2,55	1.275	27,07	13.535	30	14.810	66	32.870	125	62.490	124,98	124,98	224,98	112.490	224,98	69,92																					
	01	01	01	031	Penyusunan RKA dan DPA	waktu kegiatan Penyusunan RKA dan DPA	100	%	22.125	100	14.065	100	4.425	-	-	-	-	-	-	100	4.425	100	4.425	100,00	100,00	200,00	8.850	200,00	40,00																					
	01	01	01	036	Penyedian Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kantor	jumlah Penyedian Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Kantor	100	%	501.000	100	305.400	100	101.400	2,26	2.295	25,00	25.350	73	73.650	100	101.400	200	202.695	199,90	199,90	299,90	304.095	299,90	60,70																					
	01	01	01	066	Penyediaan Jasa Publikasi	jumlah kegiatan Penyediaan Jasa Publikasi	100	%	135.000	100	14.935	100	15.000	16,53	2.480	-	-	25	3.760	100	14.935	141	21.175	141,17	141,17	241,17	36.175	241,17	26,80																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					150,58	150,58			250,58	62,26																								
Predikat kinerja																					ST	ST																												
2	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	persen	2.575.795		749.837		99.898								153.686				253.586																									
	01	01	02	005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	waktu Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100	%	125.000	100	88.690	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-																							
	01	01	02	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor	jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kanto	100	%	1.900.000	100	394.870	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-																							
	01	01	02	024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	100	%	550.795	100	266.277	100	99.900	10,87	10.855	12,17	12.160	31	30.818	100	99.853	154	153.686	153,84	153,84	253,84	253.586	253,84	46,04																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					51,28	51,28			151,28	15,35																								
Predikat kinerja																					ST	ST																												

EVALUASI HASIL RENJA OPD INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I TAHUN 2018								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		K
1	2				3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/5*100		17	
	01	01	06	016	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	waktu Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	100	%	25.038	100	18.368	100	5.008	-	-	-	-	-	-	100	5.008	100	5.008	100,00	100,00	200,00	10.015	200,00	40,00	
	01	01	06	081	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu	waktu Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu	100	%	19.935	100	3.987	100	3.987	-	-	-	-	-	-	100	3.987	100	3.987	100,00	100,00	200,00	7.974	200,00	40,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							300,00	300,00			600,00	120,00		
Predikat kinerja																							ST	ST						
5	01	01	15		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Cakupan layanan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100,00	persen			262.743										550.561				813.304					
	01	01	15	001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	jumlah Pelatihan Pengembangan bagi Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pemerintah	100	%	1.172.500	100	477.768	100	262.743	20,77	54.559	20,70	54.397	75	196.625	93	244.980	210	550.561	209,54	209,54	309,54	813.304	309,54	69,36	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																							209,54	209,54			309,54	69,36		
Predikat kinerja																							ST	ST						
6	01	01	16		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Cakupan layanan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100,00	persen			5.408										5.408				10.815					
	01	01	16	002	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	waktu Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	100	%	27.038	100	10.815	100	5.408	-	-	-	-	-	-	100	5.408	100	5.408	100,00	100,00	200,00	10.815	200,00	40,00	INSPEKTORAT
Rata-rata capaian kinerja (%)																							100,00	100,00			200,00	40,00		
Predikat kinerja																							ST	ST						
Predikat kinerja																							ST	ST						

**EVALUASI HASIL RENJA OPD INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018**

[illegible]

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada tahun 2021 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I TAHUN 2018								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab										
													I		II		III		IV																				
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)										K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)
1	2				3	4	5		6		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8*100		15 = 7 + 13		16 = 15/5*100		17										
8	01	01	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan layanan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	persen			5.236.428										10.220.203				15.456.635														
	01	01	20	001	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	waktu Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	100	%	16.492.025	100	10.922.328	100	4.176.040	25,54	1.066.450	21,21	885.685		59	2.458.110	100	4.172.005	206	8.582.250	205,51	205,51	305,51	12.758.290	305,51	77,36	INSPEKTORAT								
	01	01	20	003	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	waktu Pelaksanaan Kegiatan LHKPN/ LHKASN dan Whisleblower system	100	%	865.230	100	899.067	100	682.177	8,70	59.316	8,24	56.216	33	222.462	91	618.255	140	956.249	140,18	140,18	240,18	1.638.426	240,18	189,36										
	01	01	20	009	Majelis TP TGR	waktu Pelaksanaan Kegiatan TP TGR	100	%	651.845	100	232.598	100	103.529	-	-	-	-	-	-	99	102.726	99	102.726	99,22	99,22	199,22	206.255	199,22	31,64										
	01	01	20	027	Penyampaian Berkas LP2P	waktu Pelaksanaan Penyampaian Berkas LP2P	100	%	589.000	100	519.781	100	274.686	19,60	53.845	23,92	65.714	69	188.439	99	270.979	211	578.978	210,78	210,78	310,78	853.664	310,78	144,93										
Rata-rata capaian kinerja (%)																						131,14	131,14				211,14	88,66											
Predikat kinerja																						ST	ST																
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						7.986.398			14.972.572														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																						136,74	136,74				246,74	57,17											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)																							ST																
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																																							
Faktor penghambat :																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya*) :																																							

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan.

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan beberapa kebijakan pengawasan yang saling terkait antara satu dengan lainnya dalam rangka mencapai terwujudnya visi dan misi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kebijakan internal

- a. Melaksanakan program-program pengawasan dengan meningkatkan sumber daya aparatur pengawasan.
- b. Mewujudkan tercapainya peningkatan kinerja pengawasan yang berhasil guna dan berdaya guna.

2) Kebijakan eksternal

Adalah kebijakan yang mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat serta mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui peningkatan pengawasan yang professional, sehingga mampu menjawab dan mengatasi tantangan kedepan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari Tahun 2016-2021.

Secara garis besar bahwa penetapan kebijakan umum pembinaan dan pengawasan, diarahkan pada penertiban dan penekanan terhadap penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan dana dan penyimpangan anggaran proyek mulai perencanaan maupun pelaksanaannya, sehingga diupayakan peningkatan pembinaan dan pengawasan (pemeriksaan) terhadap aktivitas instansi pengguna dana dilingkungan pemerintah daerah, yang pada prinsipnya menekan sekecil mungkin untuk tidak terjadi atau ruang gerak dipersempit terhadap penyimpangan dana yang tidak tepat sasaran penggunaannya tersebut.

Maka kebijakan umum dibidang pembinaan dan pengawasan Kabupaten Kapuas Hulu untuk Tahun 2016 – 2021 diarahkan pada kebijakan :

1. Peningkatan pendayagunaan pengawasan dengan upaya penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan, pemeriksaan kasus dan

pemeriksaan khusus maupun monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat terlaksana sesuai rencana kerja.

2. Peningkatan sistem/pola pemeriksaan diarahkan pada obrik-obrik yang diperiksa, agar pelaksanaan tersebut dapat terakomodir seluruhnya.
3. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan mengimplementasi alokasi/obyek pemeriksaan baik reguler, kasus, khusus dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat terlaksana dan target yang diinginkan dapat tercapai.
4. Peningkatan mutu pengawasan yang diarahkan pada sumber daya manusia melalui bimbingan teknis, pendidikan, kursus, pelatihan bagi Aparat Pengawasan Fungsional dan struktural dalam rangka pemantapan dan pertimbangan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Peningkatan/penambahan personil pengawasan yang berkualitas serta mempunyai spesialisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sehingga mampu menyesuaikan keadaan kemajuan yang sedang berjalan.
6. Peningkatan sarana penunjang pengawasan, yang diarahkan dalam rangka kegiatan pemeriksaan dapat mendukung dan tersedia, maka kegiatan tersebut dapat tercapai sasaran pemeriksaan sesuai yang direncanakan.
7. Peningkatan aktivitas evaluasi hasil pengawasan yang dilakukan melalui rapat pertemuan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan, gelar pengawasan yang meliputi : pemutakhiran data secara berkala tiga bulan sekali hasil pemeriksaan Inspektorat, BPK dan BPKP; Pemutakhiran data tingkat wilayah hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi Kalimantan Barat; Pemutakhiran data tingkat regional hasil pemeriksaan Inspektorat, Itjen Departemen dan kasus pengaduan masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu. Seperti yang tercantum dalam Renstra Inspektorat periode 2016-2021, maka **tujuan** Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah **Mewujudkan pengawasan yang profesional untuk memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.** Hal ini tentunya untuk mendukung pencapaian misi pertama Kepala Daerah terpilih yaitu **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih.**

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan ini, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu bertekad untuk meningkatkan pengawasan Internal yang berkualitas serta meningkatkan kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat.

Tabel. 3.1

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja/ Sasaran pada tahun Ke-
				2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Terwujudnya pengawasan yang profesional untuk memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Meningkatnya pengawasan Internal yang berkualitas	Persentase OPD dengan Predikat SAKIP Minimal “BB”	80%
			Persentase Temuan yang selesai ditindak lanjuti	92%
			Level Maturitas SPIP Kabupaten Kapuas Hulu	3
			Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	92%
			Persentase Kerugian Keuangan Negara yang selesai di Tindaklanjuti	
		Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat	Level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	3
			Predikat SAKIP Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	BB

Sasaran 1 : Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas

Untuk meningkatkan pengawasan internal yang berkualitas, maka Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu berencana menerapkan program **Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah**. Pengukuran keberhasilan program ini melalui 4 (empat) indikator, yaitu :

- Persentase OPD dengan nilai SAKIP minimal Baik+ (BB)
- Persentase Temuan yang selesai ditindak lanjuti
- Level Maturitas SPIP Kabupaten
- Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti
- Persentase Kerugian Keuangan Negara yang selesai di Tindaklanjuti

Sasaran 2 : Meningkatnya kapabilitas dan kinerja aparatur Inspektorat

Peningkatan kapabilitas dan kinerja Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu ditopang oleh beberapa program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- Level Kapabilitas APIP
- Predikat SAKIP Inspektorat
- Indeks kepuasan Internal Inspektorat atas layanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik

3. Program peningkatan disiplin aparatur

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- Tingkat Disiplin Pegawai

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- Persentase Aparatur yang mengikuti diklat/ Bimtek peningkatan kompetensi

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- Predikat SAKIP Inspektorat

6. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- % APIP yang memenuhi Standar Kompetensi

7. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- Level Kapabilitas APIP

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- Level Kapabilitas APIP

3.3 Program dan Kegiatan.

Berdasarkan Renja Tahun 2020, Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 memuat 8 (Delapan) Program dengan 33 (Tiga Puluh Tiga) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, program ini bertujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu, dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional.
 - d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
 - e. Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor.
 - f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
 - l. Penyediaan Makanan dan Minuman.
 - m. Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
 - n. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
 - o. Penyediaan RKA dan DPA.
 - p. Penyediaan Jasa Pendukung Kantor.
 - q. Pembuatan Aplikasi SKPD.
 - r. Penyediaan Jasa Publikasi.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdapat 2 (dua) Kegiatan yaitu :
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional.
 - b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur , terdapat 1 (satu) Kegiatan yaitu :

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdapat 1 (satu) Kegiatan yaitu :

Pendidikan dan Pelatihan Formal.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 6 (enam) Kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
 - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD.
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
 - d. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD.
 - e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD.
 - f. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. KH.
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, terdapat 1 (satu) Kegiatan yaitu :

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, terdapat 1 (satu) Kegiatan yaitu :

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdapat 4 (empat) Kegiatan yaitu :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
 - b) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
 - c) Rakorwas Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
 - d) Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
 - e) Penunjang Operasional Unit Pemberantasan Pungli.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif, merupakan pedoman Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2020. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja.

Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Review Renstra, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu didukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf, serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusun Rencana Kerja ke depan.

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021 INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.02	INSPEKTORAT					-	-		
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kepuasan pegawai atas layanan internal kantors			1.309.016.440	-		2.763.968.000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	persentase surat menyurat yang dapat diselesaikan	Inspektorat	100%	10.070.000		100%	12.350.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai standar	Inspektorat	100%	54.200.000		100%	54.200.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	persentase kendaraan operasional yang dibayar pajak tepat waktu	Inspektorat	100%	4.000.000		100%	4.000.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	persentase pembayaran insentif tenaga pengelola Keuangan	Inspektorat	100%	128.830.000		100%	367.780.000	
	Penyediaan jasa Pengamanan dan kebersihan kantors	persentase pemenuhan kebutuhan jasa pengamanan dan kebersihan kantors	Inspektorat	100%	17.657.000		100%	17.657.000	

	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	persentase ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	Inspektorat	100%	12.910.000		100%	33.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	persentase Ketersediaan Alat tulis Kantor	Inspektorat	100%	106.160.000		100%	110.630.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	persentase tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan	Inspektorat	100%	107.590.000		100%	115.540.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	persentase Tersedianya peralatan dan instalasi listrik	Inspektorat	100%	20.000.000		100%	30.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	persentase ketersdiaaan peralatan kerja yang dapat dimanfaatkan secara optimal	Inspektorat	100%	134.895.000		100%	134.982.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	persentase Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Inspektorat	100%	12.240.000		100%	12.240.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	persentase penyediaan makan dan minum kantor	Inspektorat	100%	150.000,000		100%	150.000.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Inspektorat	100%	410.619.440		100%	1.458.964.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	persentase tersedianya pembiayaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam	Inspektorat	100%	32.070.000		100%	50.000.000	
	Penyusunan RKA dan DPA	Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA	Inspektorat	3 Dokumen	4.425.000		3 Dokumen	4.425.000	
	Penyediaan jasa pendukung kantor	Peresentase Pembayaran Jasa Tenaga Pendukung Kantor	Inspektorat	100%	181.200.000		100%	181.200.000	
	Pembuatan Aplikasi SKPD	Tersedianya aplikasi SKPD untuk kebutuhan TLHP	Inspektorat	1 Paket	50.000.000		-	-	

	Penyediaan Jasa Publikasi	Jumlah Publikasi Dinas Inspektorat	Inspektorat	100%	22.000.000		15 kali	27.000.000	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi BAIK			597.990.000			597.990.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Inspektorat	1 Unit	485.000.000		1 Unit	485.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional	Persentase Kendaraan Operasional yang dilakukan pemeliharaan	Inspektorat	100%	112.990.000		100%	112.990.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Persentase Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Inspektorat	-	0		-	0	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur		-	81.550.000			81.550.000	
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	persentase pegawai dinas Inspektorat dengan pakaian dinas dan perlengkapannya sesuai aturan berlaku	Inspektorat	49 Pegawai	81.550.000		49 Pegawai	81.550.000	
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai standar			165.452.200			217.523.800	
	Pendidikan dan pelatihan formal	% tenaga Inspektorat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Inspektorat	100%	165.452.200		100%	217.523.800	

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyelesaian Capaian-capaian Kinerja Sesuai standar			26.157.000			26.157.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja yang disusun	Inspektorat	1 Laporan	5.407.500		1 Laporan	5.407.500	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang disusun tepat waktu	Inspektorat	2 Laporan	3.491.000		2 Laporan	3.491.000	
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun yang selesai tepat waktu	Inspektorat	100%	4.777.000		100%	4.777.000	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Laporan prognosis yang selesai tepat waktu	Inspektorat	1 Laporan	3.487.000		1 Laporan	3.487.000	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD	Jumlah SOP yang selesai dibuat tepat waktu	Inspektorat	20 SOP	5.007.500		20 SOP	5.007.500	
	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Kab. Kapuas Hulu	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang dibuat tepat waktu	Inspektorat	4 Laporan	3.987.000		4 Laporan	3.987.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat			334.125.520			378.679.200	
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	% Pemenuhan Diklat APIP	Inspektorat	100%	334.125.520		100%	378.679.200	

	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM	Persentase pemenuhan kebijakan dan prosedur pengawasan	Inspektorat		5.407.500			5.407.500	
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Kebijakan Sistem da Prosedur Pengawasan yang dibuat tepat waktu	Inspektorat	100%	5.407.500		100%	5.407.500	
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase pengawasan yang profesional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Inspektorat		4.442.089.700			6.338.435.000	
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	% Hasil temuan yang diselesaikan dalam pengawasan	Inspektorat	100%	2.817.982.700			4.745.500.000	
	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. % OPD dengan Nilai SAKIP (B) 2. %Rekapitulasi Hasil Audit yang selesai ditindak lanjuti 3. %Kasus/aduan masyarakat yang selesai ditindak lanjuti 4. Level Maturitas	Inspektorat	1. 75% 2. 91% 3. 92% 4. level3	762.075.500		1. 80% 2. 92% 3. 95% 4. level 3	762.075.500	
	Rakorwas Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terselesainya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat	100%	407.959.500		100%	407.959.500	

	Matelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Majelis TPTGR	Inspektorat	1 Kegiatan	133.741.000		1 Kegiatan	167.569.000	
	Penunjang Operasional Unit Pemberantasan Pungli	Jumlah Sosialisasi kegiatan UPG	Inspektorat	100%	300.331.000		100%	300.331.000	
	JUMLAH				6.941.788.360			10.409.710.500	

Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu,



Drs. H. MOHD. ZAINI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19650910 199303 1 011

